

## **BAB II**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI WILAYAH PASIFIK SELATAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Jowo Widodo terkait landasan politik luar negeri, prinsip, strategi, hingga politik luar negeri Indonesia di wilayah Asia Pasifik dan Pasifik Selatan. Selain menjabarkan mengenai politik luar negeri Indonesia di wilayah Asia Pasifik, penulis juga menitik beratkan kepada peran Indonesia di wilayah Pasifik Selatan dalam mengimplementasikan politik luar negerinya serta kepentingannya Indonesia di wilayah tersebut.

Prinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi nasional. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) tentunya melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari *Melanesian Spearhead Group* tentunya sudah mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan Indonesia terlibat di dalam forum tersebut. Indonesia tentunya memiliki kepentingan besar terhadap *Melanesian Spearhead Group*. Indonesia menganggap bahwa ASEAN adalah lingkaran konsentris utama politik luar negeri (secara geopolitik) dan menjadikan ASEAN sebagai faktor dominan secara eksternal dalam dinamika politik luar negeri. Melihat hal tersebut, ada tujuan politik Indonesia untuk memiliki pengaruh

yang sama di kawasan pasifik. Dimana kawasan pasifik yang stabil, akan mempengaruhi kawasan nusantara menjadi stabil pula.

### **A. Landasan, Prinsip dan Karakteristik Politik Luar Negeri Indonesia dalam Pemerintahan Joko Widodo**

Setiap negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Politik luar negeri Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun sejalan dengan usia negara Republik Indonesia. Pergantian kepemimpinan mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menandakan telah berlangsungnya proses demokrasi di Indonesia, meski dengan berbagai persoalan yang mengiringinya.

Dalam sistem masyarakat Internasional, Indonesia tidak bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi diharuskan untuk menaati hukum internasional yang sah dan diakui. Walaupun Indonesia harus bergerak dalam batasan hukum internasional, kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi

dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri, serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu Negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan di sekitarnya.<sup>1</sup> Dalam setiap periode pemerintahan terdapat pemaknaan yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Perbedaan interpretasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.

### **1. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia**

Didalam sebuah negara tentunya memiliki hukum, asas, ideologi, dan juga landasan. Sebagai sebuah negara, Indonesia mempunyai landasan-landasan yang dipegang teguh sebagai panutan bangsa yang berfungsi sebagai pedoman bangsa dalam berinteraksi dengan negara lain. Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Politik luar negeri Indonesia memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan

---

<sup>1</sup> Yani, A.A. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

bangsa, memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, perdamaian internasional, dan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila.<sup>2</sup> Dalam perumusannya, politik luar negeri Indonesia memiliki tiga landasan yang menjadi pilar utamanya berdiri, ketiga landasan tersebut ialah landasan idiil, konstitusional, dan operasional.

Landasan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur di dalamnya dan berkaitan dalam penentuan kebijakan luar negeri Indonesia, yang berarti bahwa politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia tidak lain merupakan salah satu cara mencapai kepentingan nasional. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri berdasarkan kepentingannya sendiri dan tidak ditentukan oleh arus politik negara lain.<sup>3</sup> Hal ini berarti pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, semakin jelas bahwa politik luar negeri Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, yang termuat dalam UUD 1945.

Sementara itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diposisikan sebagai landasan idiil dalam politik luar negeri Indonesia. Mohammad Hatta menyebutnya sebagai salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang

---

<sup>2</sup> Hatta, Mohammad, 1953. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta, Tintamas, hlm. 1-31.

<sup>3</sup> Ibid

termuat dalam Pancasila, berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hatta lebih lanjut menyatakan, bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik mana pun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.<sup>4</sup>

Selanjutnya agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Semasa Orde lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945, yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut: (1) Politik damai dan hidup berdampingan secara damai; (2) Politik tidak campur tangan dalam urusan negeri lain; (3) Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain; (4) Politik berdasarkan piagam PBB.<sup>5</sup> Berdasarkan Maklumat tersebut, sesungguhnya telah tampak jelas prinsip yang digunakan Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negerinya, yaitu kebijakan hidup bertetangga baik dengan negara-negara di kawasan, kebijakan tidak turut campur tangan urusan domestik negara lain dan selalu

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Wuryandari, Ganewati. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI. Hal 29

mengacu pada Piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain

Pada dasawarsa 1950-an landasan operasional dari prinsip bebas aktif mengalami perluasan makna. Hal tersebut diantaranya dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya berjudul “Jalannya Revolusi Kita (Jarek)” pada 17 Agustus 1960, bahwa “Pendirian kita yang bebas aktif itu, secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, agar supaya tidak berat sebelah ke Barat atau ke Timur”.<sup>6</sup> Kemudian inti dari politik luar negeri Indonesia kembali dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam “Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia” sekaligus merupakan garis-garis besar politik luar negeri Indonesia dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 2/ Kpts/ Sd/ I/ 61. Inti kebijakan tersebut, antara lain berisi tentang sifat politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dan memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>7</sup> (1) Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia; (2) Mengabdikan pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa dunia; (3) Mengabdikan pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia. Ketiga tujuan politik luar negeri tersebut pada kenyataannya tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain, khususnya dalam perjuangannya untuk membangun dunia kembali yang aman, adil dan sejahtera.

Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan

---

<sup>6</sup> Habib, A Hasnan. 1990. *Kapita Selekta; Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: CSIS. Hal. 395.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 396

formal. Diantaranta adalah:<sup>8</sup> (a) Ketetapan MPRS No. XII/ MPRS/ 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Penegasan Kembali Landasan kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia; (b) Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973; (c) Petunjuk Presiden 11 April 1973 mengenai penjabaran usaha yang perlu dilakukan untuk melaksanakan prinsip bebas aktif; (d) Petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan; (e) Keputusan-keputusan Menteri Luar Negeri.

Politik luar negeri Republik Indonesia dirumuskan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik. Sehingga pada era Soeharto, tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dirangkum menjadi 4 yaitu adanya hubungan baik dengan negara asing, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi dengan bantuan asing, serta penciptaan stabilitas politik dan keamanan dengan menggunakan militer. Indonesia tergabung dalam ASEAN, PBB, dan GNB, dimana Indonesia menjalin kerjasama dengan negara negara lain untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Terjadi transisi politik luar negeri dari masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto yang menyebabkan perubahan yang signifikan. Jika pada era Soekarno lebih menekankan pada politik luar negerinya untuk kepentingan politik dalam negeri, pada era Soeharto lebih berorientasi pada keamanan dan perekonomian untuk kepentingan pembangunan dalam negeri. Dari langkah politik luar negeri yang dilakukan Soeharto, terdapat beberapa kegagalan seperti banyaknya pergolakan yang terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dan keadilan, terjadinya krisis moneter dan semakin

---

<sup>8</sup> Balitbang Deplu RI, “*Intisari Masalah Luar Negeri*” November 1977, dikutip dalam  
<sup>8</sup> Wuryandari, Ganewati, dkk. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI. Hal 30.

jatuhnya Indonesia akibat penandatanganan Soeharto dengan IMF. Kegagalan tersebut mungkin terjadi akibat kurang diperhatikannya infrastruktur yang masih lemah serta banyaknya investor-investor nakal.

## **2. Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia**

Komitmen Indonesia untuk menentang kolonialisme dan imperialisme telah ditegaskan oleh para pemimpin bangsa sejak diraihnya kemerdekaan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengalaman masa penjajahan kurang lebih 350 tahun telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia akan pahitnya hidup dibawah kolonisasi bangsa lain. Kemerdekaan yang telah diperoleh Indonesia, tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Hal ini dikarenakan salah satu syarat terbentuknya negara yaitu pengakuan internasional, belum diterima Indonesia saat itu. Untuk mengatasi persoalan ini, upaya diplomasi keberbagain negara menjadi salah satu perjuangan yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Selain melalui jalur diplomasi, Indonesia juga melakukan upaya lain, yaitu melalui perjuangan fisik bersenjata. Ini dilakukan terutama setelah Belanda melancarkan serangan Agresi I dan II sebagai bagian dari keinginan negara tersebut untuk menanamkan pengaruhnya dan kembali bercokol di tanah air.<sup>9</sup> Namun perlu dicatat bahwa, upaya Indonesia untuk mencari pengakuan internasional tampaknya tidak didukung oleh perkembangan politik internasional yang tengah terjadi pada saat itu.

---

<sup>9</sup> Wuryandari, Ganewati. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI. Hal 40

Perang Dunia II telah menciptakan situasi persaingan yang tajam antara Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet. Indonesia sebagai sebuah negara baru yang sedang mencari jati diri, tidak lepas dari sasaran kedua blok tersebut untuk menancapkan pengaruhnya. Menurut A.H. Nasution, pada saat itu posisi Indonesia seakan terjepit. Di satu pihak, Indonesia merupakan negara baru yang sedang menghadapi persoalan untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun di pihak lain, di dalam negeri Indonesia sedang mengalami tekanan-tekanan berat yang dilancarkan oleh Front Demokrasi Rakyat / Partai Komunis Indonesia (FDR / PKI) pimpinan Amir Sjarifuddin yang menentang kebijaksanaan pemerintah Indonesia. Menurut pandangan FDR / PKI, “pertentangan yang ada antara Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet, jadi revolusi Indonesia adalah bagian dari revolusi dunia, maka Indonesia haruslah berada di pihak Rusia, barulah benar”.<sup>10</sup>

Selain itu, memang harus diakui bahwa pada saat itu politik luar negeri belum menjadi perhatian utama para pemimpin bangsa. Kondisi ini bisa dimengerti, karena Indonesia pada masa revolusi masih didera oleh berbagai persoalan domestik dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih dari tekanan Belanda. Berbagai persoalan domestic yang dihadapi, antara lain berkaitan dengan persoalan keadaan ekonomi yang buruk dan terjadinya berbagai pemberontakan di daerah-daerah. Namun, dalam situasi berat dan terjepit di antara persaingan ketat dua blok kekuatan adidaya dunia yang telah disebutkan sebelumnya, pemimpin bangsa Indonesia saat itu berani untuk menunjukkan sikap dan orientasi politik luar negerinya

---

<sup>10</sup> Nasution, A.H. 1966. *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*. Jakarta: Mega Bookstore. Hlm 125

yang independen. Indonesia berpendapat bahwa timbulnya blok-blok raksasa di dunia ini dengan persekutuan-persekutuan militernya tidak akan menciptakan perdamaian, malah sebaliknya akan merupakan benih-benih ancaman terhadap perdamaian.<sup>11</sup> Sikap tersebut dibuktikan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang merupakan penjelasan pertama kali tentang politik bebas aktif dan dinyatakan didepan Badan Pekerja KNPI pada 2 September 1948, yaitu:

Apakah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan harus memilih saja antara pro-Rusia dan pro-Amerika? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus diambil dalam mengejar cita-cita bangsa? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil ialah supaya Indonesia jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan ia harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri... Politik Republik Indonesia harus ditentukan oleh kepentingannya sendiri dan dijalankan menurut keadaan dan kenyataan yang kita hadapi... Garis politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan kepentingan negara itu sendiri.<sup>12</sup>

Di dalam pernyataan di atas, sesungguhnya telah termuat dasar dari prinsipbebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia, meskipun Hatta tidak secara definitif menyebut istilah ‘bebas Aktif’. Politik luar negeri yang bebas aktif mengandung dua unsur fundamental yaitu “Bebas” dan “Aktif”, Hatta berpendapat bahwa dalam konteks kondisi pertentangan antara dua blok, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan mempunyai jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah “Aktif” berarti

---

<sup>11</sup> Abdulgani, Roeslan. 1966. *Mendayung dalam Taufan*. Jakarta: Endang & Api Islam, dalam Wuryandari, Ganewati, dkk. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI. Hal 42

<sup>12</sup> Hatta, Mohammad. 1976. *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Pertama

upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.<sup>13</sup> Dalam arti yang lebih luas, bebas berarti menunjukkan tingginya nasionalisme dan menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia.

Dikarenakan sikap Indonesia tersebut di atas, politik luar negeri Indonesia kerap disebut sebagai netral. Namun, Hatta menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bukanlah politik netral karena tidak dihadapkan pada suatu pilihan dalam hubungan negara-negara yang sedang berperang. Sikap Indonesia tersebut lebih didasarkan atas pertimbangan untuk memperkuat dan memperjuangkan perdamaian. Hal ini perlu ditegaskan, karena politik luar negeri Indonesia selain tidak memihak pada Blok Amerika Serikat atau Blok Uni Soviet, tetapi juga tidak bermaksud untuk berpartisipasi di blok ketiga yang dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan atas dua blok besar tersebut. Hal ini juga berarti bahwa Indonesia tidak memiliki keinginan untuk membentuk blok ketiga dengan membangun kemitraan bersama negara-negara Asia dan Afrika.<sup>14</sup>

Prinsip bebas aktif telah dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat bagian-bagian antara lain:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

---

<sup>13</sup> Hatta, Mohammad. 1953. *Indonesian Foreign Policy, Foreign Affairs* (pre-1986), hal 444

<sup>14</sup> Hatta, Mohammad. 1958. *Indonesia Between The Power Blocs, Foreign Affairs* (pre-1986), hal 480

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....<sup>15</sup>

Kutipan diatas dengan jelas menuntut Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan dan ikut memajukan perdamaian dunia. Politik luar negeri suatu negara, yang merupakan perpaduan antara kepentingan nasional, tujuan nasional bangsa, kedudukan ato konfigurasi geopolitik dan sejarah nasionalnya, dipengaruhi oleh faktor domestik (internal) dan faktor internasional (eksternal). Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan suatu upaya untuk mempertemukan kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan internasional.

Politik luar negeri setiap masa tentu saja memiliki tujuan yang berbeda-beda. Semasa kepemimpinan Presiden Soekarno, Mohammad Hatta merumuskan enam tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu: (1) Untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat dan menjaga keamanan negara; (2) Untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok yang berasal dari luar negeri guna meningkatkan standard hidup masyarakat, seperti nasi, obat-obatan, dan sebagainya; (3) Untuk memperoleh modal guna membaangun kembali apa yang telah hancur atau rusak, dan modal untuk industrialisasi, konstruksi baru dan mekanisasi pertanian; (4) Untuk memperkuat prinsip hukum internasional dan untuk membantu meraih keadilan sosial pada lingkungan internasional, yang sejalan dengan piagam PBB khususnya artikel satu, dua dan lima puluh lima; (5) Untuk memberikan penekanan khusus pada upaya membangun hubungan baik dengan negara tetangga yang pada masa

---

<sup>15</sup> Lihat Pembukaan UUD 1945

lalu juga mengalami penjajahan; (6) Untuk membangun persaudaraan antar-negara melalui realisasi idealita dalam Pancasila, sebagai filosofi dasar bangsa Indonesia.

Berbagai prinsip diatas, dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang secara geopolitik terletak di antara dua samudra (Indonesia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia), menjadikan Indonesia istimewa dibandingkan negara lain. Namun wilayah Indonesia berada di posisi silang tersebut, mengandung berbagai kekuatan sekaligus kelemahan. Pada satu sisi, kekuatan Indonesia terletak pada posisi kekuasaan yang kuat dalam hubungan internasional terhadap negara-negara di sekitarnya, karena dapat memengaruhi *life line* mereka. Ditambah dengan potensi sumber daya alam yang besar, baik dalam bentuk penyediaan pangan, bahan baku dan energi. Sementara pada sisi yang lain, kepulauan Indonesia dengan perairan seluas 5 juta Km<sup>2</sup> mengandung kelemahan. Wilayah kepulauan yang sangat luas tersebut secara potensialrentan terhadap kemungkinan adanya ancaman keamanan dari pihak luar, terutama yang datang melalui laut.

### **3. Karakteristik Politik Luar Negeri Indonesia**

Pelaksanaan politik luar negeri selalu ditujukan kepada kepentingan nasional. Seperti sebagaimana kepentingan nasional, politik luar negeri memiliki ciri khas tersendiri dari masa ke masa. Idiosinkretik pemimpin bukan satu-satunya faktor yang menentukan politik luar negeri, dimana dinamika yang sedang terjadi di dalam dan luar negeri adalah faktor yang memengaruhi arah politik luar negeri. Bagaimana negara bereaksi terhadap suatu isu global atau kejadian-kejadian dewasa ini harus selalu mempertimbangkan untung rugi bagi kepentingan nasional. Persepsi yang cerdas dan bijak diperlukan untuk

menghindari kesalahan tafsir pembuat kebijakan yang dapat mengakibatkan melencengnya kebijakan luar negeri dari kepentingan nasional.

Karakter Politik Luar Negeri Indonesia adalah memperdalam penetrasi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>16</sup> Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, Joko Widodo berpegang pada prinsip Trisakti. Prinsip ini memiliki tiga pilar, yaitu; kedaulatan dalam politik, berdikari ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. Pilar kedaulatan politik berkaitan dengan kemandirian menghadapi intervensi pihak asing dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Sementara itu, pilar berdikari ekonomi dijadikan landasan bagi kebijakan luar negeri Joko Widodo yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam bidang budaya, Joko Widodo mengutamakan kepentingan budaya strategis, yakni promosi nilai budaya dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan luar negeri Joko Widodo ini mempengaruhi sikap Indonesia terhadap isu-isu global. Isu-isu yang tidak secara langsung dan nyata berdampak pada Indonesia tidak lagi berada pada prioritas utama. Dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri, kebijakan luar negeri akan dirumuskan sesuai kebutuhan sehingga lebih tepat sasaran.

Terkait dengan politik internasional dan ketahanan nasional, dalam masa kepemimpinannya, Joko Widodo akan menjalankan tiga strategi diplomasi, yakni, yang pertama, diplomasi pemerintah dengan pemerintah atau antara pemerintah. Yang kedua, diplomasi antara pelaku bisnis dan pelaku bisnis atau antara pelaku bisnis, dan strategi

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rizal Wirakara, Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kasubdi II. Menangani isu-isu kerjasama Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, terkhusus organisasi sub-regional.

diplomasi yang ketiga adalah diplomasi antara masyarakat dan masyarakat atau antara masyarakat.<sup>17</sup> Ketiga strategi itulah yang akan digunakan oleh Joko Widodo dalam politik Internasional, hubungan Internasional, mengadakan bisnis internasional dan membangun ketahanan nasional. Joko Widodo menggunakan tiga strategi tersebut untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan terjadinya benturan kepentingan antara negara asing dan Indonesia, seperti penetapan batas wilayah, klaim tumpang tindih atau penanganan masalah pencari suaka.

Para pembuat keputusan harus mengantisipasi faktor-faktor eksternal, namun faktor internal atau dalam negeri yang merupakan analisis tingkat individu dan juga negara mempengaruhi kebijakan Politik Luar Negeri. Para kaum realis menganggap kebijakan politik luar negeri lahir karena faktor-faktor eksternal, umumnya tindakan negara-negara lain atau karakteristik struktur sistem global. Para kaum realis beranggapan bahwa kebijakan luar negeri berbeda dari jenis-jenis kebijakan publik lainnya dalam arti bahwa ada pembagian yang jelas antara bidang internasional dan dalam negeri.<sup>18</sup> Kebijakan luar negeri secara eksplisit dibuat untuk mempengaruhi negara-negara lain dan aktor global, sedangkan kebijakan dalam negeri dibuat untuk mempengaruhi atau mengatur aktor-aktor dalam negeri.

Karakter dan pola pemikiran yang terbentuk terhadap kebijakan politik luar negeri berbeda dari satu masa kepemimpinan ke masa kepemimpinan lainnya. Melihat sekilas pada masa kepemimpinan

---

<sup>17</sup> Yuwono, Ismantoro Dwi. 2014. "*Jani-janji Jokowi-JK (Jika) Rakyat Tidak Sejahtera, Turunkan Saja Mereka!*". Yogyakarta: Media Pressindo.

<sup>18</sup> Richard W Mansbach & Kristen L. Rafferty. 2012. "*Pengantar Politik Global (Introduction to Global Politics)*". Bandung: Nusa Media. hal 412

Susilo Bambang Yudhoyono, banyak pihak memberikan penilaian pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) mengalami peningkatan dan perkembangan cukup signifikan. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai “prestasi” yang dicapai dalam forum regional maupun global. Dalam sepuluh tahun masa pemerintahannya, secara umum Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan kebijakan luar negeri dalam tiga program utama. Pertama, pemanfaatan politik luar negeri dalam konteks optimalisasi diplomasi. Kedua, peningkatan kerjasama multilateral dalam rangka meraih beragam peluang internasional. Ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia dalam rangka turut serta menjaga ketertiban dunia dalam berbagai persoalan keamanan internasional. Nilai-nilai dan capaian positif kebijakan luar negeri yang sudah dijalankan Susilo Bambang Yudhoyono ini perlu menjadi pijakan untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan luar negeri yang akan dijalankan Joko Widodo ke depan.

Joko Widodo mengemukakan pandangan umum mengenai proyeksi kebijakan luar negeri yang akan ditempuhnya, hal tersebut disampaikan pada saat pidato perdana dalam sidang paripurna MPR 20 Oktober 2014. Selain mengemukakan obsesi untuk mewujudkan poros maritim dunia, Joko Widodo juga menegaskan akan tetap menganut politik luar negeri “bebas aktif” dengan terus berupaya untuk turut terlibat dalam forum-forum internasional.<sup>19</sup> Indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan

---

<sup>19</sup> <http://interseksi.org/report/membaca-kebijakan-luar-negeri-sby-dan-jokowi/> di akses pada 25 November 2016, pukul 13.51 WIB

untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terkait kebijakan politik luar negeri ke depan, ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi Jokowi. Pertama soal stabilitas politik, kedua gaya kepemimpinan dan terakhir tentang proyeksi ekonomi pembangunan. Ketiganya sejatinya saling terkait satu sama lain. Dalam konteks global, “prestasi” Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berhasil mencitrakan Indonesia sebagai negara yang demokratis di mata internasional harus menjadi pekerjaan rumah Joko Widodo untuk lebih membukumkannya di level nasional.

**a. Arah Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif”  
Pemerintahan Joko Widodo**

Menjaga citra positif Indonesia di mata internasional kini menjadi tantangan besar bagi Jokowi. Tantangan dunia internasional yang senantiasa berubah-ubah, harus menjadi perhatian penting bagi Joko Widodo dalam membangun apa yang sudah dibangun Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. Sebagai negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, pemimpin ASEAN secara de facto, negara muslim demokrasi terbesar di dunia, dan negara yang berlokasi di persimpangan dunia, kebijakan luar negeri Indonesia banyak mendapat sorotan dari negara-negara luar.

Pilihan politik luar negeri “bebas aktif” perlu didefinisi secara lebih kontekstual. Perlu disadari bahwa sejak konsep ini digulirkan puluhan tahun lalu oleh Mohammad Hatta, sehingga kemudian belum diterjemahkan lagi konsepsi ini secara lebih kritis. Bahkan, terminologi politik “bebas-aktif” ini belakangan seolah berkonotasi peyoratif sebagai kata lain dari tidak bersikap dalam berbagai persoalan

internasional yang mengemuka. Konsep “bebas aktif” adalah sebuah warisan peninggalan wakil presiden pertama yang memimpin negara Indonesia yang pada saat ini digunakan untuk memperjuangkan pengakuan di tingkat internasional sebagai negara yang berdaulat dan bertabat. Konsep “bebas aktif” muncul sebagai penolakan terhadap rezim Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan keinginan untuk bertindak sendiri.<sup>20</sup> Sehingga keutuhan wilayah Indonesia melambangkan perjuangan nasional terhadap penindasan dan kebebasan dari penjajahan asing. Dikatakan juga oleh D.F. Anwar dalam bukunya yang berjudul “Kew Aspects in Indonesia’s Foreign Policy: Change and Continuity amidst a Changing Environment” bahwa konsep “bebas aktif” telah menjadi bagian dalam identitas nasional<sup>21</sup>, yang kemudian memberikan imbas pada politik Indonesia pada masa kini. Selain itu, Hikmahanto Juwana mengatakan politik luar negeri Republik Indonesia yang “bebas aktif” dapat ditafsirkan sebagai “semua negara bersahabat sampai kedaulatan Indonesia dilanggar atau kepentingan menjadi terancam”<sup>22</sup> Melalui gagasan tersebut, Indonesia menonjolkan kebebasan dan keinginannya untuk bertindak sepihak, atau berpihak dengan negara lainnya sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru memperlihatkan suatu perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Baru memahami Politik Luar Negeri sebagai upaya mempertahankan

---

<sup>20</sup> York, Michael. 2015. “*Selat Malaka Dalam Politik Luar Negeri Indonesia*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: MIHI. Tesis.

<sup>21</sup> Anwar, D.F. 2003. *Kew Aspects in Indonesia’s Foreign Policy: Change and Continuity amidst a Changing Environment. Indonesia: Foreign Policy and Domestic*. Singapore: ISEAS. Hal 1-10

<sup>22</sup> Pujajnti, A. 2015. *Arah Hubungan Bilateral Indonesia – Malaysia di Masa Perintahan Jokowi*. Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi. Sekretariat Jenderal DPR PR. Jakarta. Hal 1-2

kelangsungan hidup dan mengutamakan integritas wilayah.<sup>23</sup> Semua dilakukan sesuai garis kepentingan nasional. Meski gangguan-gangguan kecil tetap tidak bisa sepenuhnya dikatakan hilang, faktanya bahwa gerakan-gerakan separatis hingga kini masih ada di Papua, mereka menggunakan hutan-hutan ketika melakukan upaya penyerangan terhadap aparat baik TNI maupun Polri dan bahkan berbaur dengan masyarakat sekitar saat sedang melakukan aktivitas biasa. Politik Luar Negeri Orba merupakan Antitesa dari politik luar negeri orde lama. Kebijakan yang diambil baik bidang politik & ekonomi berbeda jauh dengan Orde lama. Sifat bebas-aktif adalah konsep yang interpretatif. Sifat politik luar negeri Orba yang bebas-aktif merupakan penafsiran yang berbeda dari orde lama. Ada tiga variabel penjabaran dari kepentingan nasional orde baru, yaitu perbaikan ekonomi, normalisasi hubungan dengan barat, dan revitalisasi organisasi regional.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia terkenal dengan kebijakan politik luar negeri "cari aman" dengan fondasi bebas aktif. Fondasi tersebut merupakan fondasi politik yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia kini berani bersuara keras menyatakan sikap politiknya. Kondisi ini tentu akan meningkatkan posisi politik Indonesia di mata internasional.

### **b. Strategi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Pemerintahan Joko Widodo**

Walaupun prioritas yang melandasi kebijakan politik luar negeri Indonesia belum pernah berubah sejak kemerdekaan, isu-isu yang

---

<sup>23</sup> Michel, Leifer . *Indonesia's Foreign Policy*, London: Royal Institute For Internasional Affairs George Allen and Unwin, 1983.hlm.173

diutamakan dalam kebijakan tersebut berubah sesuai dengan situasi politik yang dihadapi oleh Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia dipimpin oleh Pemerintahan Joko Widodo dan diketua oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi yang akan mengutamakan tiga isu yang dianggap sangat penting dalam memulihkan, menegakkan, dan memajukan kepentingan nasional Indonesia, yaitu: (1) Menjaga keutuhan wilayah Indonesia dengan ketat; (2) Memperlancar diplomasi perekonomian dan perdagangan; (3) Melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Hal utama adalah isu kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia yang sering dilanggar oleh negara lain. Adanya diplomasi yang disokong oleh kekuatan militer yang luar biasa, dan mampu untuk mencegah pelanggaran tersebut sangat diperlukan. Menteri luar negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi mengisyaratkan kehendaknya untuk menjalankan kebijakann luar negeri Indonesia secara lebih tegas, disorong oleh hubungan bilateral dengan cara yang mencerminkan dan memusatkan kepentingan nasional Indonesia.<sup>24</sup> Poin pertama berhubungan langsung dengan poin kedua yaitu diplomasi perekonomian, yang bertujuan meningkatkan perdagangan Indonesia dalam ekonomi Internasional. Bidang perekonomian sedang diutamakan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sistem pepaduan perekonomian melalui pemberlakuan wilayah perdagangan bebas akan mengubah system perdagangan secara menyeluruh di wilayah Asia Tenggara. Sistem perekonomian yang lebih terbuka akan menimbulkan kesempatan baru bagi ekonomi Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Retno L.P. Marsudi bahwa, diplomasi perekonomian akan disatukan untuk memperlancar

---

<sup>24</sup> York, Michael. "*Selat Malaka Dalam Politik Luar Negeri Indonesia*". Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: MIHI. Tesis.

proses penanaman modal dalam negeri dan meragamkan ekonomi Indonesia yang pada saat ini bergantung secara berlebihan pada industri komoditas.<sup>25</sup> Menurut para pengkaji ekonomi Indonesia, prioritas luar negeri Indonesia sangat cerdas dan dibutuhkan untuk memanfaatkan kesempatan yang akan muncul sebagai akibat perubahan ekonomi di Asia Tenggara.

### **c. Model Pembuatan Keputusan dalam Menentukan Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Kebijakan luar negeri Indonesia dapat dikaji dari sudut pandang proses pembuatannya keputusan. Salah satunya adalah Indonesia yang menggunakan beberapa model pembuatan keputusan untuk menentukan prioritas nasional. Melalui kajian yang berkaitan dengan penentuan kepentingan nasional Indonesia, akan lebih mampu untuk mencermati proses pembuatan keputusan secara menyeluruh dan dalam konteks pembuatan kebijakan luar negeri.<sup>26</sup> Keputusan yang interaktif dan strategis berdampak pada lebih dari satu pihak, sehingga negara memilih untuk menggabungkan sumber daya, bekerjasama, dan berkonsultasi secara timbal balik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kajian mengenai pembuatan keputusan dalam kebijakan luar negeri menyinggung pada masalah perumusan kepentingan nasional. Sebagaimana tertera dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia, “kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> DeRouen, K. Mintz. A. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press. New York.

terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan”<sup>27</sup> Kepentingan nasional digolongkan dalam tiga kelompok yaitu, kepentingan nasional yang bersifat mutlak, kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat penting. Kepentingan mutlak bersangkutan dengan hal pertahanan dan keamanan. Kementerian Pertahanan menguraikan kepentingan mutlak sebagai “fungsi pertahanan negara yang wajib menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”<sup>28</sup> Kepentingan yang bersifat vital adalah “pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan demokratis”.<sup>29</sup> Melalui penegakan kepentingan vital, Indonesia akan membudayakan ketertiban masyarakat yang akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan. Kepentingan yang bersifat penting merupakan semua hal yang ingin dicapai melalui kebijakan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang studi norma tentang perilaku antar negara, dapat dilihat dengan jelas bahwa semua negara berusaha untuk menyesuaikan perilaku nasionalnya dengan hukum internasional, sedangkan merumuskan hukum internasional yang memperbolehkan dan menerima perilaku mereka yang sesuai dengan kepentingan nasional mereka.<sup>30</sup> Gagasan tersebut mencerminkan pengaruh konstruktivisme dalam proses pembuatan keputusan.

---

<sup>27</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Hal 39

<sup>28</sup> Ibid. hal. 40

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Hard, I. 2007. *Breaking and Making International Norms: American Revisionism and Crises of Legitimacy*. International Politics. 44.

Berbicara mengenai proses pembuatan keputusan, sistem *sequential decision making* adalah proses pembuatan keputusan dalam serangkaian keputusan lainnya yang akan diterapkan secara bertahap untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>31</sup> Kemampuan Indonesia untuk menguasai tahapan pertama akan memungkinkan Indonesia melanjutkan tahapan kedua dan selanjutnya. *Sequential decision making* dapat dilakukan sepihak atau dalam kerjasama dengan negara lain. Keputusan juga dapat digolongkan berdasarkan sifat *holistic*, *heuristic*, dan *wholistic*. Pembuatan keputusan yang bersifat *holistic* merupakan pembuatan keputusan dimana semua faktor yang berimbang pada pembuatan keputusan perlu dicermati terlebih dahulu termasuk semua pilihan, dinamikan, implikasi, dan akibatnya. Untuk melakukan hal tersebut, Indonesia mengumpulkan informasi rahasia langsung dari lapangan. “Laporan intelijen sebaiknya tidak langsung digunakan dalam pengambilan keputusan, informasi perlu dikaji terlebih dahulu karena informasi yang belum dipertimbangkan dapat menimbulkan keputusan yang salah. Pembuatan keputusan perlu pula mendengarkan laporan kontra inteligen supaya keputusan tersebut seimbang”<sup>32</sup> Inteligen tidak hanya memainkan peranan yang sangat penting, tetapi juga semakin penting dalam pembuatan keputusan yang bersifat *holistic*.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menggunakan kerangka pembuatan keputusan yang bersifat *holistic* dalam menentukan tingkat kerahasiaan informasi agar semua faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan tersebut dapat dipertimbangkan terlebih

---

<sup>31</sup> York, Michael. “*Selat Malaka Dalam Politik Luar Negeri Indonesia*”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: MIHI. Tesis.

<sup>32</sup> Ibid

dahulu. Penggunaan pendekatan *heuristic* bertujuan untuk merintis pembuatan keputusan dan dianggap mirip dengan proses uji coba. Akibatnya, pembuatan keputusan yang bersifat *heuristic* dapat memungkiri faktor yang mempengaruhi kondisi kestabilan dan keamanan internasional. Sedangkan keputusan yang bersifat *wholistic* mengabaikan faktor-faktor yang penting dengan sengaja untuk menjaga kepentingan tertentu.

## **B. Politik Luar Negeri Indonesia di Kawasan Asia Pasifik**

Dalam realitasnya, kepentingan adalah suatu hal yang mendorong aktor atau dalam hal ini adalah negara untuk kemudian berhubungan dengan negara-negara maupun kawasan sekitar. Disisi lain, ketidakmampuan suatu negara sebagai aktor penting dalam tatanan global dalam memenuhi kepentingannya sendiri juga dipandang sebagai latar belakang yang memicu terjalinnya hubungan yang berimplikasi pada terbentuknya kerjasama antar negara. Dalam hal ini, Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional menerapkan aplikasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang dalam realitasnya dilaksanakan dengan menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai negara maupun kawasan yang ada disekitarnya, yakni salah satunya adalah dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik mengingat kawasan ini bersama dengan ASEAN merupakan lingkaran konsentris terdalam bagi Politik Luar Negeri Indonesia.<sup>33</sup>

Terkait Asia-Pasifik, bahwa hal yang perlu dipahami bahwasannya kawasan yang termasuk ruang lingkup Asia-Pasifik adalah wilayah yang mencakup pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australasia yang kemudian ditambah dengan negara-

---

<sup>33</sup> Setiawan, Asep. 2012. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

negara yang menghadap dan berada di Laut Pasifik. Namun, dalam konteks lain kawasan Asia-Pasifik juga dapat pula dipandang mencakup negara-negara utama di Kawasan Asia yang terletak di dalam lingkaran pacific-rim yang membujur dari Oceania, hingga ke Rusia dan turun kebawah sepanjang pantai barat Amerika.<sup>34</sup> Masuknya kawasan Asia-Pasifik bersama dengan ASEAN sebagai lingkaran konsentris terdalam bagi penerapan Politik Luar Negeri Indonesia, khususnya di era orde baru kemudian mengindikasikan kawasan Asia-Pasifik sebagai posisi yang strategis bagi Indonesia. Terkait dengan hal ini, Usman mengungkapkan bahwasannya faktor jarak yang dekat sehingga menyebabkan Asia-Pasifik dianggap sebagai kawasan yang strategis dikarenakan Asia-Pasifik dipandang dapat menjadi landasan bagi Indonesia dalam mencapai beberapa kepentingannya, yakni: (1) Asia-Pasifik dipandang sebagai wilayah strategis yang dapat menjadi landasan untuk menggalang dukungan serta memperbaiki citra Indonesia dalam skala Internasional. (2) Asia-Pasifik dipandang sebagai wilayah strategis yang dapat mengarahkan dan meresposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini cenderung mengarah pada negara-negara ASEAN dan negara-negara Barat. (3) Hadirnya PIF (Pacific Island Forum) kemudian dianggap dapat menjadi landasan yang strategis bagi Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia-Pasifik.<sup>35</sup>

Dalam merealisasikan ketiga hal tersebut, Usman kemudian mengungkapkan terdapat setidaknya dua strategi yang menjadi acuan bagi Indonesia dalam mencapai kepentingannya di kawasan Asia-

---

<sup>34</sup> Langie, Sam Jacob R. 1982. *Indonesia di Pasifik*. Jakarta: Sinar Harapan.

<sup>35</sup> Usman, Asnani, 1994, *Indonesia dan Pasifik Selatan, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta, CSIS, hlm. 187-215.

Pasifik yakni antara lain: (1) Menjalin dan menciptakan hubungan non-politik yang dipandang dapat memelihara hubungan baik di masa mendatang. Salah satu aplikasi dari strategi ini terlihat dari berbagai pertukaran pelajar antara Indonesia-Australia, serta adanya kerjasama yang disebut sebagai *Window on Australia* yakni merupakan serangkaian program kerjasama yang terjalin antara Indonesia-Australia untuk memperbaiki sekaligus membangun hubungan yang harmonis paska memburuknya kedua hubungan negara yang dipicu oleh tindakan Indonesia yang mengeksekusi mati Bali Nine. (2) Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama. Aplikasi dari strategi ini sangat berkaitan dengan kehadiran PIF, yakni bahwasannya Indonesia dalam menerapkan strategi ini terlihat dari peran Indonesia saat menjadi mitra dialog di dalam pertemuan PIF yang beranggotakan Australia, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, Vanuatu dan Federate States of Micronesia yang pada dasarnya bertujuan untuk membangun citra baik serta menjalin hubungan kerjasama.<sup>36</sup> Dalam realitasnya, penerapan strategi tersebut tidak terlepas dari pengaruh dinamika hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengalami fase-fase yang cenderung pasang-surut artinya bahwa seiring berjalannya waktu terjadi berbagai perubahan terkait hubungan yang terjalin. Pertama, hal ini terlihat secara khusus dari hubungan Indonesia dengan Australia. Indonesia dan Australia pada awalnya memiliki hubungan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari dukungan Australia terhadap Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan kedaulatan.

---

<sup>36</sup> Ibid

Kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan yang menjadi lingkaran konsentris terdalam bagi Politik Luar Negeri Republik Indonesia sehingga hal ini mengindikasikan adanya hal strategis yang dikandung oleh kawasan Asia-Pasifik terhadap pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Disisi lain, dinamika hubungan Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia-Pasifik turut mempengaruhi kepentingan strategis yang hendak dicapai sehingga dalam realitasnya, Indonesia menerapkan berbagai strategi terhadap kawasan Asia-Pasifik dalam rangka memperbaiki citra dan menjalin hubungan kerjasama yang berimplikasi pada tercapainya kepentingan nasional Indonesia. Posisi geopolitik Asia Pasifik dalam tata politik global tidak hanya sebatas menjadi pendukung semata bahkan secara ekonomi pun tidak bisa hanya dilihat sebagai pasar saja namun lebih dari itu posisi Asia Pasifik mempunyai peran yang sangat strategis baik secara politik maupun ekonomi dengan luas geografis yang dimiliki, kepadatan penduduk, maupun sumberdaya alam yang dimiliki. Asia Pasifik tidak hanya dipandang remeh dan sederhana. Terlebih pada saat ini, pertukaran politik, ekonomi, dan budaya sudah terjadi sedemikian rupa serta mengalami perubahan yang luar biasa cepatnya. Belakangan ini, Asia Pasifik menjadi salah satu kawasan yang sangat diperhitungkan terutama dalam kancah politik-ekonomi bagi kepentingan negara-negara maju. Kawasan Asia dan Pasifik seolah menjadi satu tarikan dalam geopolitik dan ekonomi, khususnya dalam perjanjian-perjanjian bilateral yang kemudian menjadi kebutuhan bersama bagi kawasan Asia dan Pasifik. Pada tingkat kawasan dunia internasional, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan, perdamaian dan stabilitas di kawan Asia Tenggara. Indonesia telah berkontribusi aktif dalam pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Terkait interaksi

dengan mitra wicara, Indonesia terus berupaya untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN.

### **C. Politik Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan**

Letak geografis Pasifik Selatan, yang demikian luas dan dekat dengan Republik Indonesia, menjadi dasar tentang pentingnya memberikan perhatian khusus dalam kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan tersebut. Negara-negara di kawasan ini, umumnya memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan Indonesia. Pasifik Selatan meliputi beberapa negara merdeka seperti Fiji, Kiribati, Nauru, Papua Nugini, Samoa barat, Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu juga Negara-negara yang masih berada di bawah pengawasan Selandia Baru yaitu: Kepulauan Cook dan Nieu, serta negara-negara koloni misalnya Samoa Amerika (Amerika Serikat), Polonesia, Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna (Perancis), Tokelau (Selandia Baru) dan Kepulauan Pitcairn (Inggris).<sup>37</sup> Regionalisme di kawasan ini telah memberikan rasa persatuan (*sense of unity*) yang berdasarkan pada keterkaitan tradisi, kepentingan, yang selanjutnya ikut mempengaruhi sudut pandang bersama. Dan karena itu, sangat penting bagi Republik Indonesia dalam melihat karakteristik Pasifik Selatan secara umum sebagai pedoman dalam menjalankan Politik Luar Negeri di kawasan tersebut.

Politik Luar Negeri bebas aktif yang menjadi prinsip politik luar negeri Indonesia terbukti memberikan sumbangsih yang berharga, baik dari sisi ekonomi, politik serta stabilitas keamanan nasional. Stabilitas keamanan adalah suatu kondisi dimana masing-masing Negara

---

<sup>37</sup> J. Kusnanto Anggoro, (1987), *Dinamika Politik di Pasific Barat Daya*, Analisa, Th, XVI, NO. 2. Hlm.160

mengharapkan hubungan tanpa kekerasan, tanpa konflik, dan peperangan dalam setiap penyelesaian masalah yang timbul dari perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara.<sup>38</sup> Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintahan Indonesia mulai menyadari arti penting Pasifik Selatan serta relevansinya dengan pertahanan dan keamanan nasional. Fakta lain yang tidak dapat dikesampingkan ialah bahwa beberapa Negara di Kawasan Pasifik Selatan memiliki kesamaan etnologi dengan penduduk yang berada diwilayah Timur Republik Indonesia.

Pasifik Selatan terbagi kedalam 3 wilayah budaya, yakni Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. Khusus untuk wilayah budaya Melanesia, yang memiliki kesamaan terutama aspek etnologi dengan penduduk di wilayah timur Indonesia, salah satunya Papua. Dibagian selatan khatulistiwa, membentang dari arah Barat menuju tengah Samudera Pasifik, merupakan wilayah budaya Melanesia. Unit-unit politik yang termasuk didalamnya adalah PNG (tanah 451.710: batas laut 5,152 km), Kepulauan Solomon (tanah 27,540 km<sup>2</sup>; batas laut 5,153 km), Vanuatu yang memiliki sekitar 180 pulau (tanah 14,760 km<sup>2</sup> ; batas laut 2.528 km), dan Kaledonia Baru (tanah 18,760 km<sup>2</sup>; batas laut 2,254 km).<sup>39</sup> Negara-negara dari rumpun ini yang cukup aktif menyuarkan gerakan Persaudaraan Melanesia, yang juga ikut aktif menyoroiti setiap persoalan yang terjadi di Papua dan Timor Leste. Wacana progresif dari kesadaran regional dikawasan tersebut sudah digagas sejak tahun 1947 dengan berdirinya Komisi Pasifik Selatan (*South Pasific Commision*). Tujuan didirikannya SPC adalah untuk memulihkan stabilitas di wilayah Pasifik yang mengalami pergolakan

---

<sup>38</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu hubungan internasional : disiplin dan metodologi*, Jakarta:LP3ES, 1990.hlm.159

<sup>39</sup> Zulkifli, Hamid. *Sistem Politik Pasifik Selatan*. Jakarta: Pustaka Jaya,1996.hlm.14.

selama Perang Dunia Kedua.<sup>40</sup> Pasifik Selatan sesungguhnya merupakan lingkaran konsentris terdalam bagi RI, karenanya, perhatian perlu diarahkan semaksimal mungkin terhadap kawasan yang pasca perang Dunia II ini mengalami perubahan politik cukup signifikan.

Perubahan politik yang dimaksud ialah berlangsungnya proses dekolonisasi dunia saat itu yang juga berdampak ke kawasan Pasifik Selatan. Kecuali Perancis, Negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru tidak keberatan melepaskan negara-negara jajahannya dikawasan tersebut. Beberapa alasan yang mungkin dapat dimengerti ialah karena negara-negara tersebut bermaksud menunjukkan itikad mereka dalam menjunjung nilai demokrasi. Sejak saat itu, lahir negara-negara Pasifik yang menginginkan kedaulatan penuh serta anti kolonialisasi. Sementara itu, perkembangan di Kawasan Pasifik Selatan mulai menunjukkan pergolakan sejak pertengahan 1970-an sampai dasawarsa 1980-an. Antara lain masalah anti-Nuklir, dekolonisasi Kaledonia Baru, peningkatan persaingan Negara-negara adikuasa, serta munculnya sikap anti-Indonesia.<sup>41</sup> Keberadaan negara-negara dikawasan Pasifik Selatan terabaikan oleh Indonesia bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar ialah karena umumnya negara-negara dikawasan Pasifik Selatan baru lahir sebagai negara merdeka pada dasawarsa 1960-an hingga 1980-an. Ada kedekatan momentum antara Indonesia yang pada medio 1960-an sibuk melakukan upaya-upaya diplomatik untuk menyelesaikan persoalan Papua yang ditangguhkan pasca Konferensi Meja Bundar, sementara Negara-negara Pasifik Selatan saat itu sedang melepaskan belenggu kolonialisme.

---

<sup>40</sup> Baiq L.S.W. Wardhani, *Kajian Asia Pasifik : Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan Menghadapi Kepentingan Negara Besar dan Kejahatan Transnasional*, Malang: Intrans Publishing, 2015.hlm.109.

<sup>41</sup> Zulkifli, Hamid. *Sistem Politik Pasifik Selatan*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1996.hlm.14.

Secara diplomatik, hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan tidak berkembang selaju hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan ASEAN menempati urutan prioritas tertinggi dalam lingkaran konsentrasi politik luar negeri Indonesia. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berperan aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN, bahkan, karena faktor geografis dan jumlah penduduknya yang besar, dipandang sebagai “saudara tua” oleh bebarap anggota ASEAN.

Sejak merdeka, Indonesia tidak pernah memberi perhatian kepada Pasifik Selatan. Sebagai negara yang lebih mengidentifikasi diri sebagai ‘Negara Lautan Hindia’, perhatian Indonesia ke Lautan Pasifik hampir terlupakan sekalipun secara geografis Indonesia juga merupakan bagian dari samudera tersebut. Identifikasi diri ini berppengaruh pada cara pandang dan sikap Indonesia terhadap kawasan sekitarnya. Berbeda dengan kawasan Asia Tenggara, kawasan Pasifik Selatan kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Politik luar negeri Indonesia, setidaknya sampai dengan tahun 1980-an tidak cukup memberi perhatian yang memadai kepada wilayah Pasifik Selatan.<sup>42</sup> Sebagai akibatnya, Indonesia bukanlah menjadi mitra bagi negara-negara di kawasan tersebut. Hal ini sangat ironis mengingat secara geografis Indonesia adalah salah satu negara tetangga terdekat dari negara-negara dan teritori Oseania. Keadaan tidak saling mengenal ini dapat merupakam salah satu penyebab dari berbagai gangguan diplomatik dengan negara-negara tetangga di Pasifik Selatan. Salah satu gangguan diplomatic yang tidak pernah diperhitungkan oleh Indonesia adalah ‘sindrom negara kecil’, seperti

---

<sup>42</sup> Wardhani, Baiq L.S.W. 2015. *Kajian Asia Pasifik*. Malang: Intrans Publishing

yang ditampakkan pada siding Umum PBB pada akhir tahun 1970-an dengan dikejutkannya Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB, yang merugikan Indonesia.<sup>43</sup> Pada saat itu terjadi voting atas tindakan Indonesia yang melakukan invansi pada Timor Timur yang dianggap melanggar hukum. Sehingga mengakibatkan banyak negara kecil di Pasifik Selatan yang tidak mendukung atau abstain dalam persoalan integrasi Timor Timur.

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kurangnya perhatian Indonesia terhadap wilayah Pasifik Selatan. Pertama, secara geopolitik kawasan Pasifik Selatan terletak di ‘halaman belakang’ Indonesia, sehingga tidak banyak mendapat perhatian dari pengambil kebijakan maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Dibandingkan dengan wilayah Asia Tenggara, yang secara geopolitik menjadi ‘halaman depan’ negara Indonesia. Kedua, sebagai kelanjutan faktor pertama, menempatkan Pasifik Selatan bukan sebagai prioritas Indonesia dalam melakukan hubungan diplomatic. Menurut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah dimiliki Indonesia, Pasifik Selatan menempati urutan kedua dalam prioritas politik luar negeri Indonesia, dan menempatkan Asia Tenggara (ASEAN) dalam lingkaran konsentris pertama. Perhatian Indonesia pada kawasan Pasifik Selatan sangatlah kecil dibandingkan dengan perhatian kepada Asia Tenggara.

Perhatian Indonesia ke Pasifik sangat timpang dibandingkan ke ASEAN, yang akhirnya ditetapkan sebagai *cornerstone* pelaksanaan politik luar negeri Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Ketiga, wilayah Oseania memiliki kemampuan ekonomi yang kecil, sehingga

---

<sup>43</sup> Ibid

hampir tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia jika bekerjasama dengan negara-negara di wilayah tersebut, walaupun sebenarnya negara-negara Pasifik memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang sangat luas yang memungkinkan negara-negara tersebut menggali sumber-sumber kekayaan lautnya. Selain kemampuan ekonominya yang kecil, berbagai kendala yang dihadapi negara-negara kepulauan di Pasifik menjadi penghambat pula bagi pengembangan lebih jauh hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara-negara kawasan. Akan tetapi bagi Indonesia, wilayah Pasifik Selatan akan selamanya penting karena letak geografis merupakan sesuatu yang tidak mungkin berubah.

Sekalipun menempati prioritas kedua dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia, hal tersebut tidak berarti bahwa Pasifik Selatan tidak penting. Bagi Indonesia, wilayah Oseania serta negara-negara yang terdapat didalamnya, kedekatan wilayah Indonesia dengan kawasan tersebut berarti terdapat kesamaan masalah diantara keduanya.<sup>44</sup> Misalnya, dalam memperjuangkan hukum laut, Indonesia berjuang bersama Fiji untuk diakuinya konsep negara kepulauan (konsep wawasan nusantara). Sebaliknya, terdapat pula negara yang memperlihatkan sikap anti-Indonesia seperti yang ditunjukkan oleh Vanuatu yang selalu menyuarakan hal-hal negatif di forum Internasional, terutama yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang bermasalah, seperti Papua dan Tiimor Timur.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Barat Daya sangatlah terbatas. Hubungan lebih erat terjalin pada masa Orde Baru. Kawasan Pasifik menempati urutan kedua dalam skala prioritas

---

<sup>44</sup> Ibid

diplomasi Indonesia. Namun kenyataannya Indonesia tidak benar-benar serius dalam implementasi kebijakannya di wilayah ini. Secara ekonomis memang negara-negara yang berada di wilayah ini tidak menguntungkan. Akibat arah kebijakan luar negeri yang salah di masa lalu, hubungan dengan kawasan ini sangat rendah. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah kunjungan ke wilayah ini, kecuali dengan Papua Nugini. Sejauh ini, Indonesia hanya bisa mempertahankan hubungan baiknya dengan negara-negara tersebut tanpa bermaksud meningkatkannya. Sikap pasif ini tidak bisa diharapkan membantu peningkatan signifikan posisi Indonesia di kawasan itu.

Kerjasama Pembangunan kapasitas (*Capacity Building*) maupun bantuan peralatan juga dilakukan melalui kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Posisi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sangat penting bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Jika dilihat dari letak geografis, Indonesia juga bisa berperan sebagai pintu gerbang bagi produk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk masuk ke pasar negara-negara anggota ASEAN. Sekalipun Indonesia pada tahap tertentu terlihat berhasil menjalin hubungan baik dengan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan, Indonesia masih harus bekerja keras untuk membina lebih baik lagi hubungan dengan negara-negara dan juga aktif dalam forum-forum di wilayah tersebut. Diplomasi Indonesia aktif pada *Southwest Pacific Dialogue* (SwPD), *Pacific Island Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG), dan *Pacific Island Development Forum* (PIDF).

Dari beberapa forum diatas, salah satu organisasi antar pemerintah di tingkat regional yang menjadi salah satu pokok utama pembahasan di Indonesia belakangan ini adalah *Melanesian Spearhead*

*Group*, yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan *the Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia*. Peluang kerjasama Indonesia dan negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* itu tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi dan perdagangan. Kerjasama di bidang mitigasi bencana akibat dampak perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat terbuka. Namun di atas semua peluang memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral dan multilateral, wakil Menteri luar negeri A.M.Fachir mengatakan bahwa kesepakatan pembentukan *Melanesian Spearhead Group* tahun 2007 di mana para anggota sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar bangsa. Diantara prinsip-prinsip yang mutlak tersebut adalah prinsip kedaulatan, kesetaraan kemerdekaan bagi seluruh bangsa, dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negaranya.<sup>45</sup>

Berbicara mengenai persoalan yang pernah dihadapi, salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia pada masa lalu adalah persoalan citra Indonesia yang selalu negatif dikalangan mereka. Berbagai petualangan politik Indonesia di masa lampau menyisakan bayangan buruk tentang Indonesia yang di nilai agresif. Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, terutama ras Melanesia dan Polinesia sedang mengalami proses pencarian jati diri. Bangsa Melanesi memiliki dasar persatuan yang kuat, yang disebut *Melanesian Brotherhood*.<sup>46</sup> Adanya isu etnologis sering dijadikan alat oleh negara-negara Pasifik Selatan dalam menyoroiti masalah kebijakan Indonesia atas Papua. Hal tersebut

---

<sup>45</sup> Memperkuat Kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan  
<http://m.antaranews.com/berita/552083/memperkuat-kehadiran-indonesia-di-pasifik-selatan> , di akses pada 6 November 2016, 09.30 WIB.

<sup>46</sup> Ibid

menyebabkan negara-negara Pasifik Selatan menyebut Indonesia sebagai negara “asing” yang patut untuk dicurigai. Selain itu, mereka juga kerap meyuarkan “Persaudaraan Melanesia” dan mengarah pada keinginan untuk membentuk suatu Federasi Bangsa Melanesia, yang Irian Barat (Papua) termasuk didalamnya. Federasi yang dimaksud tidak lain ialah pendirian *Melanesian Spreadhead Group* (MSG).

Politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Selatan di era Joko Widodo berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan terus berlandaskan prinsip bebas aktif. Segala kebijakan luar negeri Indonesia pada dasarnya diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia, seperti era Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan politik luar negeri terhadap ASEAN. Perhatian yang lebih terhadap kawasan Asia Tenggara, menyebabkan minimnya perhatian kepada wilayah Pasifik Selatan yang secara geografis juga merupakan lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia. Berbeda dengan era Joko Widodo, dimana hal ini sangat terlihat ketika Indonesia mulai aktif untuk terlibat di dalam forum Pasifik Selatan. Era pemerintahan Joko Widodo sangat gencar untuk merangkul masyarakat ras Melanesia di wilayah Timur Indonesia. Hal ini terlihat dari awal kampanye Joko Widodo (sebelum terpilih menjadi Presiden) yang dilakukan di Papua. Joko Widodo berjanji untuk membangun infrastruktur yang lebih baik di wilayah Papua, yang sebelumnya tidak terlalu menjadi pusat pembangunan.

Setelah terpilihnya Joko Widodo dan Yusuf Kalla pada tahun 2014 sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia, kabinet kerja Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Hal ini terlihat dengan bergabungnya Yohana Imbise, selaku putra daerah Papua, yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini terlihat berbeda karena sebelumnya putra daerah Papua sangat minim terlibat di dalam kabinet kerja Indonesia. Berkaitan dengan forum *Melanesian Spreadhead Group*, pada tahun 2015 status Indonesia naik menjadi *associate member*, yang awalnya adalah sebagai *observer* sejak tahun 2011. Dengan adanya peningkatan status ini, terlihat bahwa Indonesia mulai serius dalam menjalankan politik luar negeri di kawasan Pasifik Selatan. Penulis melihat bahwa sebelum naiknya Joko Widodo menjadi Presiden, Pasifik Selatan memang sudah menjadi incaran untuk melebarkan sayap dalam berpolitik luar negeri. Bagaimana tidak, pasalnya pemerintahan sebelumnya tidak berfokus pada Pasifik Selatan yang sebenarnya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap permasalahan kemerdekaan Papua.

Masalah Papua menjadi tajuk utama politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Sebagai negara-negara yang terletak digugusan kepulauan pasifik yang umumnya terdiri dari negara-negara kecil. Namun yang menjadi persoalan ialah dukungan moralnya terhadap para separatis pendukung kemerdekaan Papua atau organisasi-organisasi semacamnya yang akan mengancam keutuhan NKRI. Namun reaksi dan cara pandang dalam negeri menyikapi isu Papua tidaklah seramai isu yang mengemuka dikawasan Pasifik Selatan saat itu. Mengedepankan ras sebagai konteks yang menjadi salah satu isu mereka tentang Irian Barat sebagai persaudaraan melanesia karena umumnya Beberapa Negara dikawasan tersebut tidak melihat pada perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan atau protes-protes mereka hanya didasarkan pada asumsi bahwa Indonesia

sedang memprakarsai suatu ekspansi terhadap negara-negara di timur Papua pasca Perpera. Selain itu, fakta lain yang menguatkan ialah bahwa tidak ada satupun negara bangsa didunia yang benar-benar homogen.